



# BUPATI TAPANULI UTARA

## PROVINSI SUMATERA UTARA

### PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA

NOMOR 28 TAHUN 2020

#### TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  
DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP, DAN SURAT PERNYATAAN  
KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menegaskan Bupati menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.25/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang menegaskan Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL dan SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya;
- c. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Bupati sesuai dengan kewenangannya menetapkan daftar jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL atau SPPL;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.25/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penetapan Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 928);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP, DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tapanuli Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara.
6. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
8. Pemrakarsa adalah Penanggungjawab usaha.

9. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Usaha Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah Pengelolaan dan Pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
10. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah Pernyataan Kesanggupan dari Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup diluar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal dan UKL-UPL.
11. Izin usaha adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang wajib dimiliki oleh pelaku usaha setelah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan ini adalah sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan ini adalah:
  - a. melindungi lingkungan hidup dari pencemaran dan/atau perusakan akibat suatu usaha dan/atau kegiatan;
  - b. menanggulangi pencemaran lingkungan hidup; dan
  - c. memulihkan kualitas lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.

**BAB III**  
**KRITERIA JENIS USAHA**  
**Pasal 3**

- (1) Setiap jenis usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL wajib memiliki UKL-UPL sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Setiap usaha dan/atau Kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL wajib membuat SPPL sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## Pasal 4

Jenis Usaha dan/atau Kegiatan diluar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini akan dievaluasi oleh Tim berdasarkan hasil penapisan.

## BAB IV PELAKSANAAN Pasal 5

UKL-UPL atau SPPL disusun oleh Pemrakarsa

### Pasal 6

- (1) Pemrakarsa mengajukan UKL-UPL atau SPPL kepada Bupati C.q. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara.
- (2) Pengajuan UKL-UPL atau SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan.

### Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup wajib:
  - a. melakukan pemeriksaan UKL-UPL berkoordinasi dengan instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan dan menerbitkan rekomendasi UKL-UPL paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya UKL-UPL; atau
  - b. melakukan pemeriksaan SPPL dan memberikan persetujuan SPPL paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan SPPL.
- (2) Dalam hal terdapat kekurangan data dan/atau informasi dalam UKL-UPL atau SPPL serta memerlukan tambahan dan/atau perbaikan pemrakarsa wajib menyempurnakan dan/atau melengkapinya sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setelah berkas dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup wajib:
  - a. menerbitkan rekomendasi UKL-UPL paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya UKL-UPL yang telah disempurnakan oleh pemrakarsa; atau
  - b. memberikan persetujuan SPPL paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya SPPL yang telah disempurnakan oleh pemrakarsa.

## Pasal 8

Rekomendasi tentang UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a digunakan sebagai dasar untuk:

- a. memperoleh izin lingkungan; dan
- b. melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

## BAB V PEMBIAYAAN

### Pasal 9

Biaya penyusunan UKL-UPL atau SPPL dan pemeriksaan UKL-UPL atau SPPL dibebankan kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.

## BAB VI PENGAWASAN

### Pasal 10

Bupati melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini.

## BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 11

- (1) Setiap Pelaku Usaha/Badan Hukum yang melanggar Peraturan ini dikenakan Sanksi Administratif.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. teguran Tertulis;
  - b. pembekuan Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - c. pencabutan Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan/atau
  - d. pencabutan Izin Usaha.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 12

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang sedang melaksanakan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, wajib menyesuaikan kepada Peraturan ini.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 13**

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 23 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantau Lingkungan Hidup (UPL) di Kabupaten Tapanuli Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 14**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung  
pada tanggal 01 - 07 - 2020  
**BUPATI TAPANULI UTARA,**

Dto,-

NIKSON NABABAN

Diundangkan di Tarutung  
pada tanggal 01 - 07 - 2020  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA,**

Dto,

**INDRA SAHAT HOTTUA SIMAREMARE**  
**BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2020**  
**NOMOR 29**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. **BUPATI TAPANULI UTARA**  
**SEKRETARIS DAERAH**  
**u.b.**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**

  
ALBOIN

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA**

NOMOR : 28 TAHUN 2020  
 TANGGAL : 01 - 07 2020  
 TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN UPAYA  
 PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN  
 LINGKUNGAN HIDUP, DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN  
 PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

**JENIS RENCANA USAHA DAN/ ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MENYUSUN UPAYA  
 PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL) DAN UPAYA PEMANTAUAN  
 LINGKUNGAN HIDUP (UPL) DAN SURAT PERNYATAAN PENGELOLAAN  
 LINGKUNGAN HIDUP (SPPL) DI KABUPATEN TAPANULI UTARA**

<b>No.</b>	<b>JENIS KEGIATAN</b>	<b>SKALA BESARAN</b>	
		<b>UKL-UPL</b>	<b>SPPL</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
A.	BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN  Pembangunan Pusat Latihan Tempur	Luas ≤ 10.000 Ha	-
B.	1. Budidaya tanaman pangan dan hortikultura a. Semusiman dengan atau tanpa pengolahannya. b. Tahunan dengan atau tanpa pengolahannya.  2. Budidaya tanaman perkebunan a. Semusim dengan atau tanpa pengolahannya: – Dalam Kawasan budidaya non Kehutanan	Luas 25 Ha s/d < 2.000 Ha  Luas 50 Ha s/d < 3.000 Ha  Luas 50 Ha s/d < 2.000 Ha	Luas 5 Ha s/d < 25 Ha  Luas 5 Ha s/d < 50 Ha  Luas 5 Ha s/d < 50 Ha

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi</li> </ul> <p>b. Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam Kawasan budidaya non Kehutanan</li> <li>- Dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi</li> </ul>	<p>Luas 50 Ha s/d &lt; 2.000 Ha</p> <p>Luas 50 Ha s/d &lt; 3.000 Ha</p> <p>Luas 50 Ha s/d &lt; 3.000 Ha</p>	<p>Luas 5 Ha s/d 50 Ha</p> <p>Luas 5 Ha s/d &lt; 50 Ha</p> <p>Luas 5 Ha s/d &lt; 50 Ha</p>
C.	BIDANG PERIKANAN		
	<p>1. Usaha Budidaya Perikanan</p> <p>a. Budidaya tambak udang/ikan dengan teknologi super intensif luas.</p> <p>b. Usaha Budidaya Perikanan dengan menggunakan keramba (jaring apung dan pensystem):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- di air tawar (danau)</li> <li>- jumlah</li> </ul>	<p>Luas 10 Ha s/d &lt; 50 Ha</p> <p>Luas 1 Ha s/d &lt; 5 Ha</p> <p>200 Unit s/d &lt; 1.000 Unit</p>	<p>Luas 2 Ha s/d &lt; 10 Ha</p> <p>Luas 0,5 Ha s/d &lt; 1 Ha</p> <p>50 Unit s/d &lt; 200 Unit</p>
D.	BIDANG PETERNAKAN		
	<p>1. Budidaya Unggas</p> <p>2. Budidaya Ternak Babi</p> <p>3. Budidaya Kambing</p> <p>4. Budidaya Kerbau</p> <p>5. Budidaya Sapi Perah</p> <p>6. Usaha Penampungan Ayam</p>	<p>≥ 15.000 ekor</p> <p>≥ 125 ekor</p> <p>≥200 ekor</p> <p>≥ 50 ekor</p> <p>75 ekor</p> <p>≥ 1.000 ekor</p>	<p>1.000 s/d &lt; 15.000 ekor</p> <p>30 s/d &lt; 125 ekor</p> <p>100 s/d &lt; 200 ekor</p> <p>25 s/d &lt; 50 ekor</p> <p>10 s/d &lt; 75 ekor</p> <p>500 s/d &lt; 1.000 ekor</p>



	<p>2. Pembangunan Pelabuhan dengan salah satu Fasilitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dermaga</li> </ul> <p>Panjang: 50 m s/d ≤ 200 m</p> <p>Luas: 600 m<sup>2</sup> s/d ≤ 3.000 m<sup>2</sup></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>b. Penahan Gelombang (talud)</li> </ul> <p>Panjang 50 m s/d &lt; 500 m</p> <p>3. Pengerukan Perairan Sungai</p> <p>Vol. 50.000 s/d &lt; 250.000 m<sup>3</sup></p> <p>4. Pembangunan Bandar Udara beserta fasilitasnya berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Landasan Pacu</li> <li>b. Bangunan Terminal</li> <li>c. Luas lahan</li> </ul> <p>Panjang 100m s/d &lt; 1.800m</p> <p>Luas 1.000 m<sup>2</sup> s/d 10.000 m<sup>2</sup> ≤ 100 Ha</p> <p>5. Pembangunan Tower Receiver</p> <p>Tinggi ≥ 20 m</p> <p>6. Pembangunan Stasiun Televisi</p> <p>Tinggi ≥ 20 m</p> <p>7. Pembangunan Stasiun Radio (AM, FM)</p> <p>Tinggi ≥ 20 m</p>	<p>10 m s/d &lt; 50 m</p> <p>10 m<sup>2</sup> s/d &lt; 600 m<sup>2</sup></p> <p>10 m s/d &lt; 50 m</p> <p>100 m<sup>3</sup> s/d 50.000 m<sup>3</sup></p> <p>Panjang &lt; 100 m</p> <p>Luas 20 s/d &lt; 1.000 m<sup>2</sup></p> <p>-</p> <p>5 m s/d &lt; 20 m</p> <p>5 m s/d &lt; 20 m</p> <p>5 m s/d &lt; 20 m</p>
H.	BIDANG PERINDUSTRIAN	
	<p>1. Kegiatan Industri yang tidak termasuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Semen</li> <li>b. Petrokimia</li> <li>c. Kawasan Industri</li> </ul> <p>2. Kegiatan industri pulp</p> <p>3. Kegiatan Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang berlokasi di luar kawasan</p>	<p>Semua Besaran</p> <p>Semua Besaran</p> <p>Semua Besaran</p> <p>100 s/d &lt; 300.000 ton pulp/ tahun</p> <p>&lt; 100 ton pulp/tahun</p>

	<p>industri yang menggunakan areal yang berada di wilayah Kabupaten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- skala/besaran</li> </ul>	1 Ha s/d < 30 Ha	< 1 Ha
I.	<p>BIDANG PEKERJAAN UMUM</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan Bendungan/waduk atau jenis tampungan air lainnya: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tinggi atau</li> <li>- Luas genangan</li> </ul> </li> <li>2. Daerah Irigasi <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan jaringan irigasi</li> <li>- Peningkatan dengan Luas tambahan</li> <li>- Pencetakan Sawah (Perkebunan)</li> </ul> </li> <li>3. Pengembangan Rawa <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reklamasi rawa untuk keperluan irigasi</li> </ul> </li> <li>4. Pembangunan Pengaman Pantai dan Perbaikan Muara Sungai <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jarak dihitung tegak lurus pantai</li> </ul> </li> <li>5. Normalisasi Sungai (termasuk sodekan dan pembuatan Kanal Banjir)</li> </ol>	<p>5 m s/d &lt; 15 m 50 s/d &lt; 200 Ha</p> <p>Luas 250 Ha s/d &lt; 3.000 Ha</p> <p>Luas 300 Ha s/d &lt; 1.000 Ha</p> <p>Luas 100 Ha s/d &lt; 500 Ha</p> <p>Luas 500 Ha s/d &lt; 1.000 Ha</p> <p>Luas 10 m s/d &lt; 500 m</p>	<p>&lt; 5 m &lt; 50 Ha</p> <p>&lt; 250 Ha</p> <p>&lt; 300 Ha</p> <p>&lt; 100 Ha</p> <p>Luas &lt; 500 Ha</p> <p>&lt; 10 m</p>

	<p>a. Kota Sedang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Panjang</li> <li>- Volume Pengerukan</li> </ul> <p>b. Pedesaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Panjang</li> <li>- Volume Pengerukan</li> </ul>	<p>2 km s/d <math>\leq</math> 10 km  <math>&lt; 500.000 \text{ m}^3</math></p> <p>4 km s/d <math>\leq</math> 15 km  <math>&lt; 500.000 \text{ m}^3</math></p>	<p><math>&lt; 2 \text{ km}</math>  -  <math>&lt; 4 \text{ km}</math>  -</p>
	<p>6. Pembangunan dan atau peningkatan jalan dengan pelebaran yang membutuhkan pengadaan lahan:</p> <p>a. Kota Sedang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Panjang jalan <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ pengadaan lahan</li> </ul> </li> <li>- Luas pengadaan tanah</li> </ul> <p>b. Pedesaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Panjang jalan <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ pengadaan lahan</li> </ul> </li> <li>- Luas pengadaan tanah</li> </ul>	<p>2 km s/d <math>\leq</math> 5 km  <math>5 \text{ Ha s/d } &lt; 30 \text{ Ha}</math>  <math>5 \text{ Ha s/d } &lt; 40 \text{ Ha}</math></p> <p>2 km s/d <math>\leq</math> 5 km  <math>5 \text{ Ha s/d } &lt; 40 \text{ Ha}</math>  <math>5 \text{ Ha s/d } &lt; 50 \text{ Ha}</math></p>	<p><math>&lt; 2 \text{ km}</math>  <math>&lt; 5 \text{ Ha}</math>  <math>&lt; 5 \text{ Ha}</math></p> <p><math>&lt; 2 \text{ km}</math>  <math>&lt; 10 \text{ Ha}</math></p>
	<p>7. Pembangunan Jembatan</p> <p>8. Persampahan</p> <p>a. Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA) dengan sistem control landfill/ sanitary landfill termasuk instalasi penunjangnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Luas Kawasan TPA</li> <li>- Kapasitas Total</li> </ul> <p>b. Pembangunan Transfer Station</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kapasitas</li> </ul> <p>c. Pembangunan Instalasi Pengolahan Sampah Terpadu</p>	<p>Panjang 100 m s/d <math>&lt; 500\text{m}</math></p> <p><math>&lt; 10 \text{ Ha}</math>  <math>&lt; 100.000 \text{ ton}</math></p> <p><math>&lt; 500 \text{ ton/hari}</math></p>	<p>Panjang <math>&lt; 100 \text{ m}</math></p> <p>-  -  -</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kapasitas</li> <li>d. Pengolahan dengan insinerator</li> <li>- Kapasitas</li> </ul> <p>9. Air Limbah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), termasuk fasilitas penunjangnya.</li> <li>- Luas</li> <li>- Kapsitasnya</li> </ul> <p>b. Pembangunan sistem perpipaan air limbah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Luas Layanan</li> <li>- Debit air limbah</li> <li>- Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)</li> </ul>	<p>&lt; 500 ton/hari</p> <p>&lt; 50 ton/hari</p> <p>&lt; 2 Ha</p> <p>&lt; 50 m<sup>3</sup> / hari</p> <p>&lt; 500 Ha</p> <p>&lt; 16.000 m<sup>3</sup> / hari</p> <p>&lt; 6 Ha</p>	- - - - - - - -
10.	Pembangunan saluran Darinase (Primer dan / atau Sekunder) di permukiman	1,5 Km s/d < 10 Km	< 1,5 Km
11.	Jaringan Air bersih perkotaan	<p>50 Ha s/d &lt; 5000 Ha</p> <p>5 Km s/d &lt; 40 m</p>	<p>&lt;50 Ha</p> <p>&lt;5 Km</p>
12.	Pengembalian air bersih dari danau, mata air permukaan, atau sumber air permukaan lainnya. Debit pengambilan.	25 liter/detik s/d < 250 liter/detik	< 25 liter/detik

J.	<p><b>BIDANG SUMBER DAYA ENERGI DAN MINERAL</b></p> <p>1. Mineral dan Batubara</p> <p>b. Luas perizinan</p> <p>c. Luas daerah terbuka untuk pertambangan</p> <p>2. Batubara/ Gambut Kapasitas, dan atau Jumlah material penutup yang dipindahkan</p> <p>3. Bahan galian bukan logam atau batuan Kapasitas, dan/atau Jumlah material penutup yang dipindahkan</p> <p>4. Pengambilan air bawah tanah (sumur tanah dangkal, sumur tanah dalam, dan mata air)</p>	<p>1 Ha s/d ≤ 200 Ha</p> <p>1 Ha s/d ≤ 50 Ha</p> <p>&lt;1.000.000 ton/tahun</p> <p>&lt;4.000.000 bcm/tahun</p> <p>1 Ha s/d 50 Ha</p> <p>&lt; 50 liter/detik (dari 1 sumur sampai dengan 5 sumur dalam satu area &lt; 10 Ha)</p>	<p>&lt; 1 Ha</p> <p>&lt; 1 Ha</p> <p>-</p> <p>&lt; 1 Ha</p> <p>-</p>
	<b>KETENAGALISTRIKAN</b>		
	<p>1. Pembangunan Jaringan Transmisi</p> <p>2. Pembangunan PLTD/PLTG/PLTU/PLTGU/PLTDG/PLTMG/PLTMGU</p> <p>3. Pembangunan PLTA dengan:</p> <p>a. tinggi bendung</p> <p>b. atau luas genangan</p> <p>c. atau aliran langsung (kapasitas daya)</p> <p>d. daya tamping waduk</p> <p>4. Pembangunan PLT (Bayu, Surya, Biomassa)</p> <p>5. Pembangunan PLT Sampah</p>	<p>50 KV s/d 230 KV</p> <p>200 KW s/d 100 MW</p> <p>3 s/d &lt; 15 m</p> <p>1 s/d &lt; 200 Ha</p> <p>100 KW s/d &lt; 50 MW</p> <p>100 m<sup>2</sup> s/d ≤ 500.000 m<sup>2</sup></p> <p>≤ 50 MW</p> <p>≤ 50 Ton/hari</p>	<p>&lt; 50 KV</p> <p>&lt; 200 KW</p> <p>&lt; 3 m</p> <p>&lt; 1 Ha</p> <p>&lt; 100 KW</p> <p>≤ 100 m<sup>2</sup></p> <p>-</p> <p>-</p>

	<p>6. Pembangunan PLT Bio Nabati</p> <p>7. Pembangunan Kilang Bio Fuel</p> <p><b>MINYAK DAN GAS BUMI</b></p> <p>1. Pembangunan Kilang</p> <p>a. LPG</p> <p>b. LNG</p> <p>c. Minyak Bumi</p> <p>2. Kilang Minyak Pelumas Bekas (termasuk fasilitas penunjang)</p> <p>3. Depot BBM dan/atau BBG</p> <p>4. SPB</p>	<p><math>\leq 100</math> MW</p> <p><math>\leq 100.000/\text{ton}</math></p> <p><math>&lt; 50</math> MMSCFD</p> <p><math>&lt; 550</math> MMSCDF</p> <p><math>&lt; 10</math> BOPD</p> <p><math>&lt; 10.000 \text{ ton/tahun}</math></p> <p>Semua besaran</p> <p>Semua besaran</p>	-
K.	<p><b>BIDANG PARIWISATA</b></p> <p>1. Usaha Penyediaan Akomodasi</p> <p>a. Hotel</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Kamar</li> <li>- Atau Luas Bangunan</li> </ul> <p>b. Pondok Wisata</p> <p>c. Bumi Perkemahan</p> <p>2. Usaha Rekreasi Hiburan Umum:</p> <p>a. Taman Rekreasi</p> <p>b. Gelanggang renang</p> <p>c. Pemandian alam</p> <p>d. Gelanggang permainan dan ketangkasan</p> <p>e. Dunia fantasi</p> <p>f. Teater atau panggung terbuka</p> <p>g. Teater tertutup</p> <p>h. Taman satwa</p> <p>i. Balai pertemuan umum</p>	<p><math>\leq 1.000</math> kamar</p> <p><math>&lt; 1</math> Ha</p> <p><math>&lt; 2</math> Ha</p> <p><math>&lt; 2</math> Ha</p> <p><math>5 \text{ s/d } &lt; 100</math> Ha</p> <p><math>&lt; 100</math> Ha</p> <p><math>\geq 200</math> kursi</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p><math>&lt; 5</math> Ha</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>

	j. Barber shop k. Salon kecantikan l. Karaoke keluarga m. Spa keluarga n. Kolam renang o. Gelanggang olahraga tertutup p. Gelanggang olahraga terbuka	$\geq 15$ kursi $\geq 15$ kursi Semua besaran $< 100$ Ha $< 100$ Ha $< 100$ Ha $< 100$ Ha	$< 15$ kursi $< 15$ kursi - - - - -
L.	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  1. Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Pengelola Tertentu: a. wilayah perkotaan b. wilayah perdesaan c. untuk keperluan settlement transmigrasi  2. Perluasan Perumahan dan Kawasan Permukiman a. perluasan perumahan di perkotaan dengan luas lahan b. perluasan perumahan di perdesaan dengan luas lahan  3. Peremajaan kawasan permukiman di perkotaan	$\leq 5$ Ha $\leq 50$ Ha $\leq 2.000$ Ha  $\leq 2$ Ha $\leq 10$ Ha  $< 5$ Ha	- - -  - -  -

Daftar Singkatan:

m	= meter
$m^2$	= meter persegi
$m^3$	= meter kubik
km	= kilometer
$km^2$	= kilometer persegi
Ha	= hektar
l	= liter
dt	= detik
KW	= kilowatt
kwh	= kilowatt hour
KV	= kilovolt
MW	= mega watt
TBq	= Terra Becquerel
BOPD	= Barrel Oil Per Day = minyak barrel per hari
MMSCDF	= Million metric square cubic feet per day (juta metrik persegi kaki kubik per hari)
DWT	= Dead weight tonnage = bobot mati
KK	= kepala keluarga
LPG	= Liquified Petroleum Gas = gas minyak bumi yang dicairkan
LNG	= Liquified Natular Gas = gas alam yang dicairkan
ROW	= Right of way = daerah milik jalan (damija)
BOD	= Biological Oxygen demand = kebutuhan oksigen biologis
COD	= Chemical Oxygen Demand = kebutuhan oksigen kimiawi
DO	= Dissolved Oxygen = oksigen terlarut
TSS	= Total Suspended Solid = total padatan tersuspensi
TDS	= Total Dissolved Solid = total padatan terlarut

BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto,-

NIKSON NABABAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. BUPATI TAPANULI UTARA  
SEKRETARIS DAERAH  
u.b.  
KEPALA BAGIAN HUKUM



ALBOIN